

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan sebagai suatu jalan yang ditempuh bagi seluruh anak-anak bangsa agar dapat mengembangkan potensi, minat dan bakat yang dimilikinya sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, kompetitif, berkarakter serta memiliki daya saing yang tinggi. Untuk memenuhi tantangan tersebut, tentunya diperlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar pendidikan dapat terselenggara secara optimal sampai kepada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu penyelenggara pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan seluruh peserta didiknya agar menjadi tenaga kerja yang kompeten dalam bidang yang ditekuninya. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, lulusan dari sekolah menengah kejuruan sering kali diberikan label ‘lulusan siap kerja’.

Namun, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Sekolah Menengah Kejuruan masih menempati posisi yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan kejuruan yang bertugas untuk mempersiapkan peserta didik yang ‘siap kerja’. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut antara lain lulusan sekolah menengah kejuruan tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha/dunia industri. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa melakukan berbagai upaya untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah terhadap penanganan masalah dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai Revitalisasi SMK melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Munculnya kebijakan ini merupakan solusi yang cukup menjanjikan bagi penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa diperlukannya kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

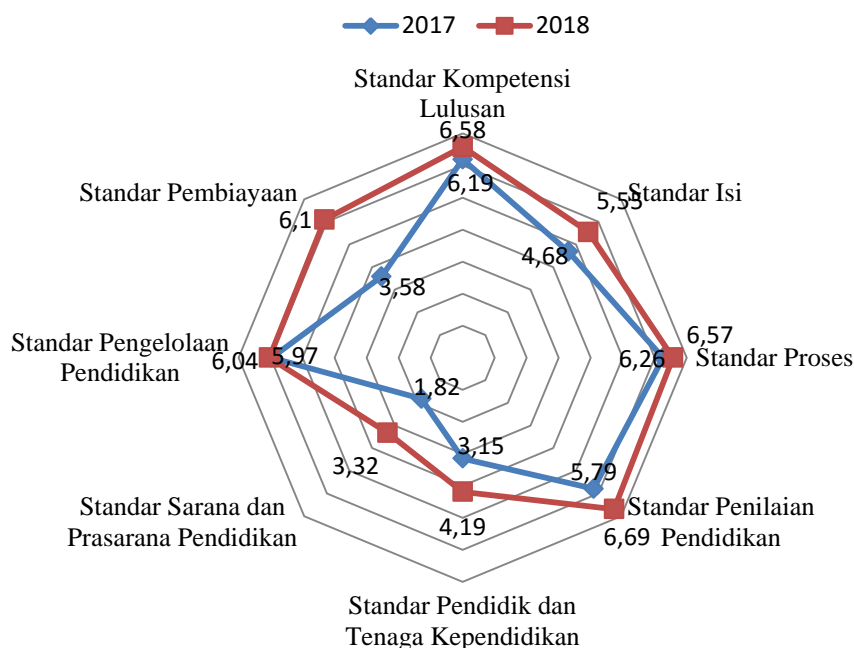
Sesuai dengan judul kebijakannya, Revitalisasi SMK merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui kegiatan penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum (*link and match*), inovasi pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DU/DI) dan perguruan tinggi, standardisasi sarana dan prasarana utama dan penataana/pengelolaan kelembagaan.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam program Revitalisasi SMK ini yaitu mengenai standardisasi sarana dan prasarana utama, dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan. Peraturan ini membahas delapan standar nasional pendidikan bagi sekolah menengah kejuruan yang telah disempurnakan dan diselaraskan dengan kebutuhan pengguna lulusan sekolah menengah kejuruan, salah satunya mengenai standar sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang mendukung kegiatan pendidikan terutama bagi sekolah menengah kejuruan yang dalam kegiatan belajar mengajar banyak menggunakan berbagai macam peralatan sesuai dengan kompetensi keahliannya. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan belum memenuhi standar.

Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Negeri 3 Bandung, Penulis memperoleh data Raport Mutu Sekolah yang berisi mengenai capaian standar nasional pendidikan SMK Negeri 3 Bandung pada tahun 2017 dan 2018, yang diuraikan pada gambar di bawah ini.

### Pencapaian Standar Nasional Pendidikan di SMKN 3 Bandung



*Gambar 1.1* Capaian Standar Nasional Pendidikan SMK Negeri 3 Bandung Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data tersebut, standar sarana dan prasarana pendidikan meraih nilai yang terendah diantara pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian standar sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 3 Bandung pada tahun 2018 memiliki nilai 3,32 yang dapat dikategorikan “Menuju SNP 2”. Padahal, sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang menunjang kegiatan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Rendahnya pemenuhan standar sarana dan prasarana juga digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fattah dan Abubakar (2013) tentang Analisis Biaya Investasi Pendidikan dan Biaya Personal Siswa di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa pada umumnya, setiap SMA dan SMK memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung PBM di sekolah dan dipandang masih baik meskipun harus dilakukan rehabilitasi berkala dan berkelanjutan agar optimal, tetapi belum terstandardisasi dengan baik. Berdasarkan penelitian tersebut, mengindikasikan bahwa standar sarana dan prasarana harus mendapatkan perhatian yang berlebih

agar dapat segera terpenuhi sehingga dapat mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana yang dialami oleh satuan pendidikan yaitu terbatasnya biaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan. Rendahnya biaya pendidikan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fattah (2012, hlm. 8) yang menjelaskan bahwa, “biaya yang rendah berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar secara kualitas *outcomes* yang dihasilkan, artinya ada korelasi positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan”.

Di samping itu, biaya pendidikan memberikan peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan karena untuk melaksanakan suatu program pendidikan, perlu dipersiapkan seberapa besar biaya yang dibutuhkan agar tujuan dari program pendidikan tersebut dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriadi (2010, hlm. 3) yang mengemukakan bahwa, “hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan”. Salah satunya, berkenaan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kondisi ini berbanding terbalik antara besarnya kebutuhan akan sarana dan prasarana dengan terbatasnya biaya pendidikan yang tersedia untuk memenuhi hal tersebut.

Kondisi ini dialami oleh satuan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Manajemen Mutu SMK Negeri 3 Bandung pada kegiatan wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam rangka studi pendahuluan, didapatkan informasi bahwa salah satu penyebab tidak terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana di sekolah tersebut yaitu karena keterbatasan biaya pendidikan dalam pengadaan alat-alat praktik. Dalam kegiatan wawancara, Wakil Manajemen Mutu mengemukakan bahwa,

Kegiatan pendidikan di SMK Bisnis dan Manajemen sebagian besar dilaksanakan melalui kegiatan praktik. Sehingga sekolah mengalami kesulitan dalam pengadaan sarana praktik seperti komputer, yang

Salma Nur Sundus, 2020

**ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memerlukan biaya yang tinggi dalam pengadaannya. Hal ini berakibat pada keterbatasan pengadaan sarana praktik tersebut dalam setiap tahunnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya jumlah peserta didik setiap tahun, sehingga mengalami kekurangan sarana praktik ini. Selain itu, alat-alat praktek tersebut harus selalu dilakukan pembaharuan (*upgrade*) setiap tahun sehingga menambah kebutuhan akan biaya pemeliharannya.

Keterbatasan biaya pendidikan yang diperoleh satuan pendidikan berkaitan erat dengan sumber dana pendidikan yang diperolehnya dari pihak-pihak tertentu. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Bandung, diperoleh informasi bahwa sumber dana pendidikan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Negeri 3 Bandung berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hibah dalam bentuk sarana dan prasarana secara fisik dan sumbangan dari masyarakat. Hibah yang diperoleh dari Direktorat Pembinaan SMK bersifat tidak rutin dan diperoleh secara terbatas.

Dengan adanya berbagai sumber dana yang diperoleh sekolah tersebut, kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana tidak dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf, Abdurrahman, dan Hidayat (2019) tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima) yang menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS yaitu anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, serta dana BOS belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh. Sehingga mengindikasikan perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Mengingat urgensi sarana dan prasarana dalam menciptakan pendidikan yang bermutu bagi setiap satuan pendidikan, terutama bagi sekolah menengah kejuruan yang dalam proses pendidikannya didominasi oleh kegiatan praktik, memerlukan proses perencanaan yang matang berkenaan dengan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana.

Salma Nur Sundus, 2020

**ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Sehingga, apabila standar sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik, maka akan menghambat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Termasuk keterbatasan biaya pendidikan yang dapat menghambat pemenuhan sarana dan prasarana sehingga berdampak pada keberhasilan kegiatan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana di SMK, sehingga judul penelitian yang diangkat adalah :

**“Analisis Kebutuhan Biaya Pendidikan Untuk Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung”.**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan. Adapun masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa sajakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung?
2. Berapakah besaran biaya yang dibutuhkan untuk penambahan luas lahan dan bangunan agar sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung?
3. Berapakah besaran biaya yang dibutuhkan untuk penambahan sarana ruang praktik/ laboratorium keahlian agar sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghimpun biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana pada

Salma Nur Sundus, 2020

**ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan memfokuskan perhatian pada aspek penting yaitu untuk mengetahui:

1. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.
2. Besaran biaya yang dibutuhkan untuk penambahan luas lahan dan bangunan agar sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.
3. Besaran biaya yang dibutuhkan untuk penambahan sarana ruang praktik/ laboratorium keahlian agar sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.
4. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menghimpun biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kota Bandung.

Salma Nur Sundus, 2020

*ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN DI KOTA BANDUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis ataupun bagi seluruh pihak yang terlibat selama proses penelitian. Adapun manfaat yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan kajian keilmuan Administrasi Pendidikan, khususnya untuk menambah wawasan mengenai penyusunan perencanaan terkait dengan pembiayaan pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi literatur ataupun kajian pustaka bagi penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.4.2 Secara Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Manfaat bagi penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan pengembangan pola pikir dalam pengembangan keilmuan Administrasi Pendidikan khususnya dalam bidang Perencanaan Pendidikan.

#### **1.4.2.2 Bagi Satuan Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi pengembangan manajemen pendidikan di sekolah yang bersangkutan khususnya mengenai perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan biaya pendidikan untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

#### **1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan karya tulis ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan variabel yang sudah diteliti ini secara lebih luas dan mendalam.



### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memudahkan pembaca ketika melihat dan memahami isi dari laporan penelitian ini, penulis mengurutkan sistematikan laporan penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I** : **Pendahuluan**, merupakan bagian yang berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II** : **Kajian Pustaka**, merupakan bagian yang berisi uraian mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi landasan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian pustaka diperoleh dari buku-buku ataupun sumber-sumber lain yang mendukung.
- BAB III** : **Metode Penelitian**, merupakan bagian yang berisi penjabaran secara rinci mengenai metode penelitian serta komponen-komponen penelitian lainnya.
- BAB IV** : **Temuan dan Pembahasan**, merupakan bagian yang berisi pemaparan data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di lapangan serta pengolahan dan analisis terhadap data temuan lapangan.
- BAB V** : **Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi**, merupakan bagian yang berisi penafsiran dan/atau pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan dalam penelitian.